



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era pembangunan yang sedang berkembang dan juga berlangsung saat ini terlihat tuntutan tugas, wewenang dan tanggung-jawab yang semakin meningkat dan kompleks dari semua pihak.

Di kalangan organisasi baik Pemerintah maupun swasta semakin terasa perlunya penyelesaian tugas-tugas secara tepat, cepat, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai hal tersebut di atas diperlukan pembinaan terhadap pegawai-pegawai tersebut. Terutama di kalangan pemerintahan untuk melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas.

“ Dalam suatu penyelenggaraan kerja maka manusialah yang menduduki tempat yang vital. Teknik permesinan dapat ditingkatkan tetapi apabila tidak ada manusia yang menjalankan mesin-mesin maka mesin-mesin itu akan menjadi besi tua dan mati “.¹

Sehingga tanpa manusia tujuan akan tetap tinggal tujuan belaka, bahkan dapat dipastikan bahwa organisasi ini sendiripun tidak mungkin ada.

¹ Arifin Abdurrachman, *Persoalan manusia Dalam Manajemen, Majalah Administrasi Negara*, LAN, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 23.

Untuk kelancaran jalannya organisasi dalam usaha mencapai tujuan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat diperlukan adanya manajemen yang baik yaitu semua kegiatan dilandasi oleh suatu sikap kerja yang benar-benar profesional. Prinsip seperti ini akan dapat dijalankan jika tenaga pelaksanaannya terdiri dari pegawai-pegawai yang memiliki keahlian, kecakapan dan kemampuan kerja yang tinggi dan juga dilandasi dengan rasa pengabdian dan tanggung-jawab terhadap tugas yang diberikan.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang tercantum dalam GBHN tergantung antara lain dari kesempurnaan para aparatur negara yaitu pegawai negeri. Kesadaran akan pentingnya peranan pegawai negeri dalam pembangunan nasional memberikan perhatian tentang pembinaan pegawai negeri sipil seperti yang tertulis di bawah ini :

Tujuan pembinaan pegawai adalah supaya keseluruhan aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah benar-benar merupakan aparatur yang berwibawa, kuat, berdaya guna, bersih, penuh kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah serta diisi oleh tenaga ahli yang mampu menjalankan tugas dalam bidang masing-masing dan hanya mengabdikan diri kepada kepentingan negara dan rakyat.²

Pegawai yang berdaya guna adalah pegawai yang mempunyai kemampuan tinggi untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber yang tersedia dan sadar akan pentingnya pencapaian sasaran yang telah ditentukan baik

² Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 200.